

## BAB II

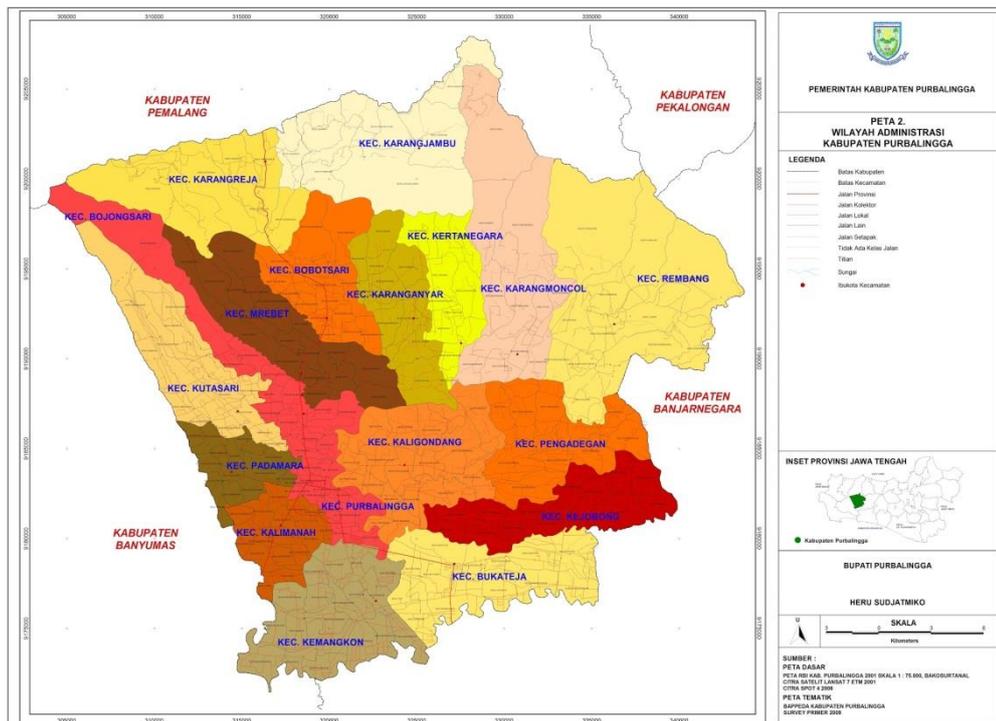
### GAMBARAN UMUM

Pada bab ini adalah gambaran umum yang akan menjelaskan tentang gambaran umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis serta gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga.

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Purbalingga**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi 109°11' – 109°35' Bujur Timur, dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Pekalongan

Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kota di sekitarnya diantaranya, Semarang 191 km, Purwokerto 20 km, Cilacap 60 km, Banjarnegara 45 km, Wonosobo 75 km. Melihat jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari kota-kota tetangga, maka menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai wilayah strategis yang bisa mengakses dan di akses secara mudah.

Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah 18 Kecamatan yang tersebar di hampir semua dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga. Adapun rincian luas menurut Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Kec. Kemangkon	4.513 ha
2.	Kec. Bukateja	4.240 ha
3.	Kec. Kejobong	3.999 ha
4.	Kec. Pangadegan	4.175 ha
5.	Kec. Kaligondang	5.054 ha
6.	Kec. Purbalingga	1.472 ha
7.	Kec. Kalimanah	2.251 ha
8.	Kec. Padamara	1.721 ha
9.	Kec. Kutasari	5.290 ha
10.	Kec. Bojongsari	2.925 ha
11.	Kec. Mrebet	4.789 ha
12.	Kec. Bobotsari	3.228 ha
13.	Kec. Karangreja	7.449 ha
14.	Kec. Karangjambu	4.609 ha
15.	Kec. Karanganyar	3.055 ha
16.	Kec. Kertanegara	3.802 ha
17.	Kec. Karangmoncol	6.027 ha
18.	Kec. Rembang	9.159 ha

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.1, luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Purbalingga, kecamatan yang memiliki luas paling besar yaitu Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 ha sedangkan luas wilayah paling sempit yaitu Kecamatan Pengadegan dengan luas wilayah 1.175 ha.

## **2.2 Kondisi Pemerintahan**

### **Visi**

**”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU  
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKHLAK MULIA”**

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional. Efisien, efektif, bersih dan demokratis. Sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan, guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokakl, serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 terdiri dari 18 kecamatan, 224 Desa, dan 15 kelurahan. Jumlah Rukun Warga (RW) 1546 dan Rukun Tetangga (RT) 5069

**Tabel 2.2**

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2014**

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Kemangkon	19	-
2.	Bukateja	14	-
3.	Kejobong	13	-
4.	Pengadegan	9	-
5.	Kaligondang	18	-
6.	Purbalingga	2	11
7.	Kalimanah	14	3
8.	Padamara	13	1
9.	Kutasari	14	-
10.	Bojongsari	13	-
11.	Mrebet	19	-
12.	Bobotsari	16	-
13.	Karangreja	7	-
14.	Karangjambu	6	-
15.	Karanganyar	13	-
16.	Kertanegara	11	-
17.	Karangmoncol	11	-
18.	Rembang	12	-
	<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>15</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.2, pembagian wilayah administratif Kabupaten Purbalingga jumlah desa yang paling banyak yaitu 19 desa ada di Kecamatan Mrebet dan Kemangkon, sedangkan jumlah desa paling sedikit yaitu 6 desa ada di Kecamatan Karangjambu. Jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah paling banyak 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Purbalingga.

### 2.3 Infrastruktur

Jalan merupakan prasarana darat yang sangat dibutuhkan untuk melakukan mobilisasi seluruh aktivitas manusia. Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga sampai tahun 2015 yaitu 784,23 km, yang terdiri dari 778,36 km jalan beraspal, 5,8 km jalan tanah, dan sudah tidak ada lagi jalan berkerikil.

**Tabel 2.3**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2010-2015**

No	Tahun	Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1.	2010	684,72	19,38	6,1	-	710,20
2.	2011	695,44	12,25	2,5	-	710,20
3.	2012	698,45	10,25	1,5	-	710,20
4.	2013	700,35	8,35	1,5	-	710,20
5.	2014	703,65	5,05	1,5	-	710,20
6.	2015	778,36	0,00	5,8	-	784,23

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.3, panjang jalan yang beraspal setiap tahunnya meningkat hingga tahun 2015 jalan beraspal di Kabupaten Purbalingga ada 778,36 KM, sedangkan jalan berkerikil sudah tidak ada lagi.

## **2.4 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

### **2.4.1 Kedudukan BAKEUDA**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada akhir tahun 2016 diadakan penataan kembali dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bdan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, BAKEUDA merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

### **2.4.2 Tugas Pokok BAKEUDA**

Tugas pokok BAKEUDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang, urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2.4.3 Fungsi BAKEUDA**

Dalam melaksanakan tugas, BAKEUDA mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.4.4 Visi dan Misi BAKEUDA Kabupaten Purbalingga**

##### **Visi**

“ Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Dinamis”

##### **Misi**

1. Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Merumuskan kebijakan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **2.4.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

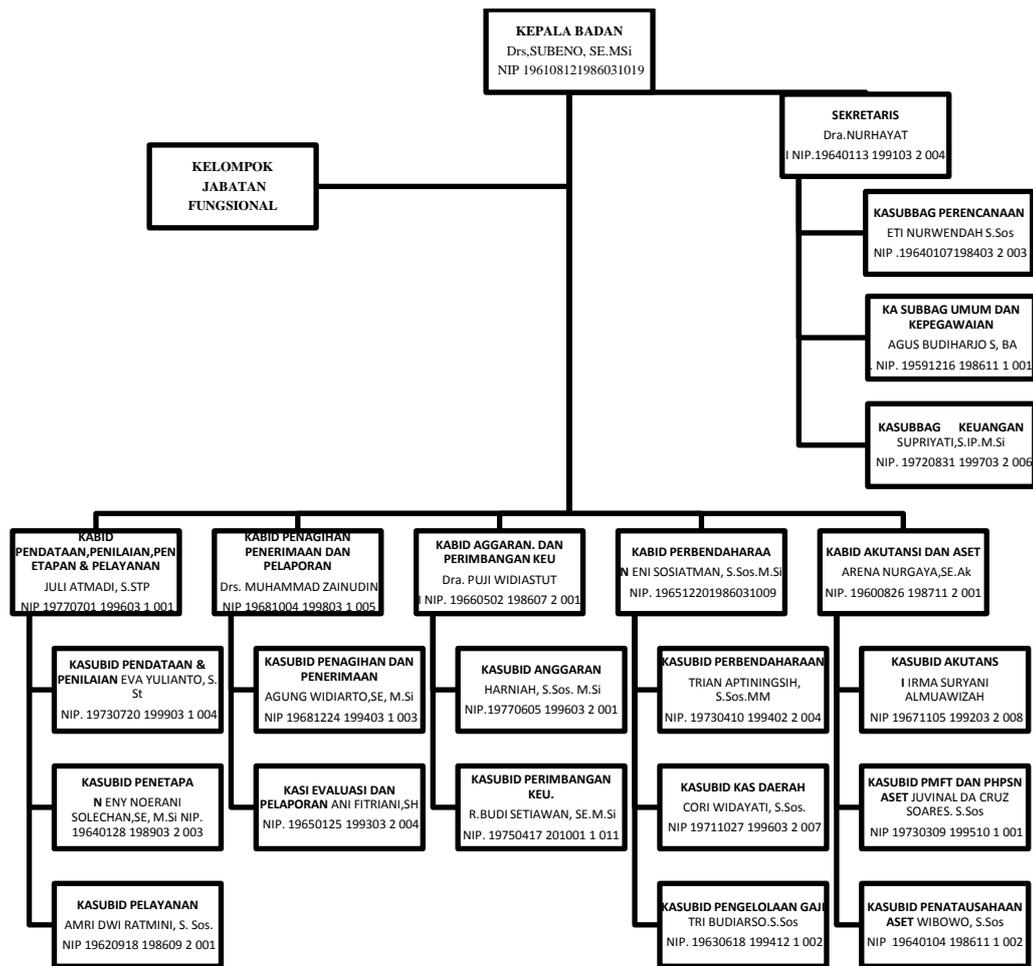
Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- i. Kepala Badan
- ii. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
- iii. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan
  - a. Sub Bidang Anggaran
  - b. Sub Bidang Perimbangan Keuangan
- iv. Bidang Perbendaharaan
  - a. Sub Bidang Perbendaharaan
  - b. Sub Bidang Kas Daerah
  - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji
- v. Bidang Akuntansi dan Aset
  - a. Sub Bidang Akuntansi
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
  - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset
- vi. Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - b. Sub Bidang Penetapan
  - c. Sub Bidang Pelayanan

- vii. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan
  - a. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2016**



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018

## **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan badan serta pemberi dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKEUDA.

### **a. Subbagian Perencanaan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelola data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAKEUDA.

### **b. Subbagian Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan badan, dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

### **c. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAKEUDA.

## **2. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan**

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

### **a. Subbidang Anggaran**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah.

### **b. Subbidang Perimbangan Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan , pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang meliputi penyusunan kebijakan pengelolaan perimbangan daerah, penyusunan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pengeluaran dan pelaksanaan verifikasi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

### **3. Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perbendaharaan, pengelolaan gaji dan kas daerah.

#### **a. Subbidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan.

#### **b. Subbidang Pengelolaan Gaji**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan.

#### **c. Subbidang Kas Daerah**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan.

### **4. Bidang Akuntansi dan Aset**

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang Akuntansi, pemanfaatan dan penghapusan aset serta penatausahaan aset.

#### **a. Subbidang Akuntansi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan.

**b. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, penatausahaan, evaluasi serta pelaporan.

**c. Subbidang Penatausahaan Aset**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

**5. Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan**

Mempunyai tugas merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pendataan, penilaian, penetapan dan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**a. Subbidang Pendapatan dan Penilaian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

**b. Subbidang Penetapan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

**c. Subbidang Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan , pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

## **6. Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan**

Mempunyai tugas merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang Penagihan dan Penerimaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.

### **a. Subbidang Penagihan dan Penerimaan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

### **b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Badan**

Mempunyai tugas sebagai teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BAKEUDA dapat dibentuk UPTB

#### 1.4.6 Data Kepegawaian

berikut ini adalah data kepegawaian berdasarkan Golongan Ruang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 2.4**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Per November 2017**

No	Jenis Kelamin	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
		A	B	C	d	A	B	c	d	A	b	C	d	a	b	C	d
1	Laki-Laki	-	-	2	1	-	3	5	4	5	7	7	5	4	-	1	-
2	Perempuan	-	-	-	-	-	-	3	-	6	6	6	10	2	2	-	-
	Jumlah	-	-	2	1	-	3	8	4	11	13	13	15	6	2	1	-

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari IV golongan dimana jumlah paling banyak ada di golongan IIIId yaitu 15 orang yang terdiri dari 5 pegawai laki-laki dan 10 pegawai perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di golongan Id yaitu 1 pegawai laki-laki saja.

berikut ini adalah data kepegawaian berdasarkan pendidikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 2.5**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan**  
**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Per November 2017**

No	JenisKelamin										
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1	Laki-Laki	-	3	12	-	-	6	2	17	4	-
2	Perempuan	-	-	4	-	-	4	-	22	5	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	<b>16</b>	-	-	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	-

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak berjumlah 39 pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yang terdiri dari 17 pegawai laki-laki dan 22 pegawai perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit dengan tingkat pendidikan D4 yang terdiri dari 2 orang pegawai laki-laki.

Berikut ini adalah data kepegawaian berdasarkan jabatan struktural Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 2.6**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural**  
**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Per November 2017**

No	Jenis Kelamin	ESELON							
		Vb	Va	IVb	Iva	IIIb	IIIa	Iib	Ia
1	Laki-Laki	-	-	-	7	3	-	1	-
2	Perempuan	-	-	-	9	2	1	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	16	5	1	1	-

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan jabatan struktural dengan jumlah paling banyak dari eselon IVa dengan jumlah 16 pegawai yang terdiri dari 7 pegawai laki-laki dan 9 pegawai perempuan. Sedangkan jumlah paling sedikit berasal dari eselon IIIa dengan jumlah 1 orang pegawai perempuan dan 1 pegawai laki-laki dari eselon Iib.

Berikut ini adalah data kepegawaian berdasarkan jabatan Fungsional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga :

**Tabel 2.7**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Fungsional**  
**Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Per November 2017**

No	Jenis Kelamin	Jabatan Fungsional					
		Audito	Perencana	Analisis	Pengawas	Penilik	JFU
	Laki-Laki	-	-	-	-	-	33
	Perempuan	-	-	-	-	-	23
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	-	<b>56</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.7 dapat dilihat bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan jabatan fungsional

dengan jumlah 56 pegawai yang terdiri dari 33 pegawai laki-laki dan 23 pegawai perempuan.

#### **1.4.7 Data Kepegawaian Bidang Akuntansi dan Aset**

##### **1. Kedudukan**

Bidang Akuntansi dan Aset adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Akuntansi dan pengelolaan Aset Daerah, berada di bawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Badan.

##### **2. Tugas**

Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidan Akuntansi, pemanfaatan dan penghapusan aset serta penatausahaan aset.

##### **3. Subbidang Akuntansi**

Subbidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, penatausahaan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Bagan Akun Standar (BAS) Akuntansi Pemerintah Daerah
- b. Evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah
- c. Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah

- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD
- e. Rekonsiliasi laporan keuangan perangkat daerah
- f. Penyusunan neraca daerah
- g. Pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
- h. Evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional perangkat daerah
- i. Konsolidasi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dari semua perangkat daerah
- j. Rekonsiliasi/konsolidasi laporan keuangan BUMD
- k. Rekonsiliasi/konsolidasi laporan BLUD
- l. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan saldo lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### **4. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset**

Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pengamanan, pengawasan dan pengendalian, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah
- b. Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris
- c. Penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
- d. Penghapusan barang milik daerah

- e. Sensus barang milik daerah
- f. Penilaian barang milik daerah berdasarkan hasil inventarisasi dan sensus barang
- g. Penyiapan dokumen, kerjasama pemanfaatan aset milik daerah dengan pihak lain
- h. Analisa penggunaan pemanfaatan dan penghapusan barang daerah
- i. Penelitian usu penggunaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### **5. Subbidang Penatausahaan Aset**

Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
- c. Milik Daerah (RKPBMMD)
- d. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- e. Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- f. Penyusunan analisis standar harga barang
- g. Inventarisasi barang milik daerah

- h. Rekonsiliasi mutasi barang milik daerah dengan semua pengguna jalan
- i. Administrasi penerimaan barang yang berasal dari sumbangan atau kewajiban pihak ketiga;
- j. Pembinaan kepada pengurus barang pada perangkat daerah.

## **6. Fungsi**

Bidang Akuntansi dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.
- b. Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Pembinaan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- d. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
- e. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- f. Penyusunan rencana pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Penatausahaan barang milik daerah.
- h. Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- i. Pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
- j. Penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah
- k. Pembinaan teknis pengelolaan barang milik daerah

- l. Penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan aset daerah.
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Tabel 2.8**  
**Penempatan Aparatur Sipil Negara**  
**Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Purbalingga**

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
Arena Nurgaya, SE.Akt	Pembina(IV/a)	Kabid Akuntansi dan Aset
Irma SuryaniAlmuawizah	Penata Tingkat I(III/d)	Kasubbid Akuntansi
1. Sari Indriastuti, S.E	Penata Muda TingkatI(III/b)	Staf Bakeuda
2. Tri Komalasari Dewi,A.Md	Pengatur Tingkat I(II/b)	Staf Bakeuda
3. Widodo Pranoto, SE	Penata Muda Tingkat I(III/b)	Staf Bakeuda
4. Kurniawan	Penata Muda Tingkat I(III/b)	Staf Bakeuda
Juvinal Da Cruz Soares,S.Sos	Penata Muda Tingkat I(III/b)	Kasubbid Penatausahaan Aset
1. Chamzawi,S.T	Penata Muda (III/a)	Staf Bakeuda
Wibowo, S.Sos	Penata Tingkat I(III/d)	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
<b>Nama Pegawa</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
1. Agus Supriyadi, SH	Penata (III/c)	Staf Bakeuda
2. Dedy Prihatno, SE	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bakeuda

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

## 2.4.8 Data Aset Tanah

**Tabel 2.9**  
**REKAPITULASI ASET TANAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN 2016**

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Selisih Lebih/ Kurang	Keterangan
		Jumlah Bidang	Luas M2	Jumlah Bidang	Luas M2		
1.	Tanah bersertifikat pemda	707	4.078.388	688	3.948.770	-19	Mutasi ke provinsi dan pusat
2.	Tanah bersertifikat non pemda	55	474.239	47	375.239	-8	Mutasi ke provinsi
3.	Tanah dalam proses sertifikat	72	368.453	70	360.086	-2	1 bidang mutasi ke provinsi , 1 bidang di sertifikat
4.	Tanah belum diusulkan sertifikat	382	3.482.785	561	4.001.618	179	Penambahan dari tanah fasum kelurahan purbalingga wetan dan tanah jalan DPU
	<b>Jumlah</b>	<b>1216</b>	<b>8.403.865</b>	<b>1366</b>	<b>8.685.713</b>		

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sudah bersertifikat tahun 2015 berjumlah 707 bidang berkurang pada tahun 2016 yaitu menjadi 688 bidang dengan selisih 19 bidang. Selisih 19 bidang ini yaitu karena mutasi ke Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

**Tabel 2.10**  
**Selisih Aset Tanah Bersertifikat**  
**Mutasi Ke Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016**

No	Lokasi	Peruntukan	Luas
1	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.100
2	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.100
3	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	4.348
4	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.650
5	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.250
6	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	4.070
7	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.165
8	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.170
9	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.160
10	Kel.Purbalingga kulon / Kec.Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	1.195
11	Desa Bukateja / Kec.Bukateja	SMA N 1 Bukateja	2.550
12	Desa Bantarbarang / Kec.Rembang	SMA N 1 Rembang	15.233
13	Desa Karangreja / Kec. Karangreja	SMA N Karangreja	5.038
14	Desa Karangreja / Kec. Karangreja	Perluasan SMA N Karangreja	2.840
15	Desa Padamara / Kec.Padamara	SMA N Padamara	15.000
16	Desa Panican / Kec.Kemangkon	SMA N 1 Kemangkon	10.000
17	Desa Bukateja/Kec.Bukateja	SMK N 1 Bukateja	7.000
18	Desa Bukateja/Kec.Bukateja	SMK N 1 Bukateja	3.000
19	Desa Selanegara / Kec. Kaligondang	SMK N 1 Kaligondang	15.000
20	Desa Bodaskarangjati/Kec. Rembang	SMK N 2 Rembang	7.503
21	Desa Selaganggeng / Kec.Mrebet	SMK N 2 Purbalingga Bagian Utara	7.300
22	Desa Selaganggeng / Kec.Mrebet	SMK N 2 Purbalingga Bagian Selatan	2.700
23	Desa Selaganggeng / Kec.Mrebet	SMK Negeri 2 Purbalingga	10.000
24	Desa Bojongsari / Kec.Bojongsari	SMK N 1 Bojongsari	9.797
25	Desa Banjarkerta/Kec.Karanganyar	SMK Negeri 1 Karanganyar	554

No	Lokasi	Peruntukan	Luas
26	Desa Banjarkerta/Kec.Karanganyar	SMK Negeri 1 Karanganyar	1104
27	Kel. Kadanggampang / Kec. Purbalingga	Perluasan Terminal Purbalingga	40
28	Kel.Kalikabong / Kec.Kalimanah	Terminal Bus Purbalingga	6.790
29	Kel.Kalikabong / Kec.Kalimanah	Perluasan terminal Purbalingga	933
	<b>Jumlah</b>		<b>140.589</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.10 selisih aset tanah yang mutasi ke Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan menjadi urusan konkuren Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, juga terdapat aset tanah terminal bus Purbalingga yang mutasi ke Provinsi Jawa Tengah karena tipe terminal bus Purbalingga menjadi tipe B yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Aset tanah bersertifikat non Pemerintah Daerah adalah aset yang bersertifikat bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, namun dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Aset tanah non Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 berjumlah 55 bidang kemudian tahun 2016 menjadi 47 bidang, hal ini berkurang karena ada 8 bidang mutasi ke Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

**Tabel 2.11**  
**Selisih Aset Tanah Non Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun**  
**2016**  
**Mutasi Ke Provinsi Jawa Tengah**

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
1	Kel. Purbalingga Kulon / Kec. Purbalingga	SMA N 1 Purbalingga	16.496
2	Kel. Bancar / Kec. Purbalingga	SMA N 2 Purbalingga	15.000
3	Desa Bukateja / Kec. Bukateja	SMA N 1 Bukateja	12.328
4	Desa Meri / Kec. Kutasari	SMA N 1 Kutasari	8.975
5	Desa Gumiwang / Kec. Kejobong	SMA N 1 Kejobong	9.820
6	Desa Majapura / Kec. Bobotsari	SMA N 1 Bobotsari	12.449
7	Desa Majapura / Kec. Bobotsari	SMA N 1 Bobotsari	15.357
8	SMK Negeri 1 Purbalingga	SMK Negeri 1 Purbalingga	8.575
	Jumlah		<b>99.000</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berdasarkan data tabel 2.11 selisih aset tanah non Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengalami mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah aset tanah yang digunakan untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang pasal (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pendidikan menengah atas menjadi urusan Provinsi, oleh sebab itu tanah yang diperuntukan untuk sekolah menengah atas maupun kejuruan menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pula.

Aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang masih dalam proses pensertifikatan pada tahun 2016 70 bidang berkurang 2 bidang dari tahun 2015 yang berjumlah 72 bidang. Selisih 2 bidang yang berkurang pada tahun 2016 yaitu karena ada 1 bidang mutasi ke provinsi yaitu tanah yang diperuntukan untuk SMK 1 Karanganyar yang berlokasi di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar

dengan luas 7.527 m<sup>2</sup> dan 1 bidang sudah bersertifikat yaitu tanah di sebelah Dispertannhut yang berlokasi di Kelurahan Purbalingga Wetan dengan luas 1.063 m<sup>2</sup>.

Aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang belum di usulkan sertifikat pada tahun 2015 berjumlah 382 naik pada tahun 2016 menjadi 561 bidang. Terdapat kenaikan 179 bidang pada tahun 2016 yang terdiri dari tanah fasilitas umum(Fasum) Kelurahan Purbalingga Wetan yaitu diperuntukan untuk perumahan Abdi Kencana Purbalingga Wetan dan Tanah Jalan DPU yang merupakan ruas jalan baru. Berikut ini adalah data penambahan aset tanah dari fasilitas umum (fasum) Kelurahan Purbalingga Wetan yang belum diusulkan sertifikat tahun 2016

**Tabel 2.12**  
**Tanah Fasilitas Umum Kelurahan Purbalingga Wetan**  
**belum diusulkan sertifikat tahun 2016**  
**Kabupaten Purbalingga**

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
1	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	2654
2	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	320
3	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	300
4	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1892
5	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1792
6	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	260
7	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	260
8	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	260

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
9	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	260
10	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	695
11	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	227,5
12	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	222,5
13	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	210
14	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1400
15	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	305
16	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	285
17	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	210
18	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1195
19	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	168
20	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	187,5
21	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	540
22	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	363
23	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	672
24	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	441
25	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	681
26	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	858
27	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	2785
28	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	2700
29	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	2100
30	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	850

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
31	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	913,7999878
32	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	247,8000031
33	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	3908
34	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	630
35	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	496,2000122
36	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	879,5999756
37	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	587,4000244
38	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1489,8
39	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	234,3
40	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	222
41	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	205,8
42	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	2410
43	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1277
44	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	1290
45	Kelurahan Purbalingga Wetan	Perum Abdi Kencana Purbalingga Wetan	600
	<b>Jumlah</b>		<b>40.485,2</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*

Berikut ini, data penambahan aset tanah berupa ruas jalan baru yang ada di

Kabupaten Purbalingga yang belum diusulkan sertifikat tahun 2016 :

**Tabel 2.13**  
**Ruas Jalan Baru**  
**Belum Diusulkan Sertifikat Tahun 2016**

No	Lokasi	Peruntukan	Luas
1	Jalan Lingkar Pasar Segamas	Dinas Pekerjaan Umum	5.508
2	Jalan Pisang	Dinas Pekerjaan Umum	1.098
3	Jalan Wiramuda	Dinas Pekerjaan Umum	10.196
4	Jalan Wirakarya	Dinas Pekerjaan Umum	1.506
5	Jalan Karangsentul - Koprak Tanwir	Dinas Pekerjaan Umum	2.265
6	Jalan Mauneng	Dinas Pekerjaan Umum	1.704
7	Jalan Sidaguri	Dinas Pekerjaan Umum	1.151
8	Jalan Seruni	Dinas Pekerjaan Umum	1.290
9	Jalan Brobot – Karanglewas	Dinas Pekerjaan Umum	6.441
10	Jalan Jl. Menjangan Sari	Dinas Pekerjaan Umum	2.502
11	Jalan Jl Mt. haryono-Letnan Yusuf	Dinas Pekerjaan Umum	2.877
2	Jalan Rabak – Karangtengah	Dinas Pekerjaan Umum	3.484
13	Jalan Selabaya – Klapasawit	Dinas Pekerjaan Umum	7.848
14	Jalan Kalikabong - Grecol 2	Dinas Pekerjaan Umum	4.704
15	Jalan Sokawera - Karangpule	Dinas Pekerjaan Umum	2.340
16	Jalan Selabaya – Karangsari	Dinas Pekerjaan Umum	3.252
17	Jalan Rabak – Sidakangen	Dinas Pekerjaan Umum	4.192
18	Jalan Kalitinggar – Prigi	Dinas Pekerjaan Umum	4.592
19	Jalan Kalitinggar – Mipiran	Dinas Pekerjaan Umum	9.676
20	Jalan Karanggambas - Mipiran	Dinas Pekerjaan Umum	3.030
21	Jalan Bojanegara - Klapasawit	Dinas Pekerjaan Umum	7.032
22	Jalan Padamara - Karangjambe	Dinas Pekerjaan Umum	6.600
23	Jalan Beji – Metenggeng	Dinas Pekerjaan Umum	10.452
24	Jalan Gambarsari – Jetis	Dinas Pekerjaan Umum	8.896
25	Jalan Panican – Senon	Dinas Pekerjaan Umum	14.956
26	Jalan Kemangkong - Kedunglegok	Dinas Pekerjaan Umum	2.859
27	Jalan Kedunglegok - Palumutan	Dinas Pekerjaan Umum	12.696
28	Jalan Galuh – Banjaran	Dinas Pekerjaan Umum	6.000
29	Jalan Bumisari–Binangun (Jumbleng)	Dinas Pekerjaan Umum	16.138
30	Jalan Binangun – Jumbleng	Dinas Pekerjaan Umum	8.994
31	Jalan Lambur - Serayukaranganyar	Dinas Pekerjaan Umum	6.492
32	Jalan Mangunegara - Karangturi	Dinas Pekerjaan Umum	3.921
33	Jalan Lingkar Pasar Sinduraja	Dinas Pekerjaan Umum	3.150
34	Jalan Penolih – Cilapar	Dinas Pekerjaan Umum	6.000
35	Jalan Selanegara - Sidareja (SMP Kaligondang - Sidanegara)	Dinas Pekerjaan Umum	6.969
36	Jalan Binangun – Cipaku	Dinas Pekerjaan Umum	10.650

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
37	Jalan Slinga - Kembaran Wetan	Dinas Pekerjaan Umum	3.876
38	Jalan Pramuka	Dinas Pekerjaan Umum	429
39	Jalan Budiono	Dinas Pekerjaan Umum	340
40	Jalan Karangduren	Dinas Pekerjaan Umum	3.749
41	Jalan Puspahastama - Kedungjati	Dinas Pekerjaan Umum	8.000
42	Jalan Dagan-Limbasari	Dinas Pekerjaan Umum	8.820
43	Jalan Tlagayasa-Palumbungan	Dinas Pekerjaan Umum	5.495
44	Jalan Limbasari-Buara	Dinas Pekerjaan Umum	1.491
45	Jalan Banjarsari – Buara	Dinas Pekerjaan Umum	16.352
46	Jalan Karangjambu – Ponjen	Dinas Pekerjaan Umum	41.090
47	Jalan Kabunderan – Brakas	Dinas Pekerjaan Umum	6.740
48	Jalan Kaliori – Margasana	Dinas Pekerjaan Umum	3.688
49	Jalan Lingkar Bandingan	Dinas Pekerjaan Umum	1.959
50	Jalan Bandingan – Lamuk	Dinas Pekerjaan Umum	2.049
51	Jalan Sinduraja – Gumiwang	Dinas Pekerjaan Umum	6.897
52	Jalan Lingkar Siaren Karangreja	Dinas Pekerjaan Umum	2.055
53	Jalan Nangkod – Sambong	Dinas Pekerjaan Umum	4.500
54	Jalan Lamuk – Bukateja	Dinas Pekerjaan Umum	4.063
55	Jalan Lingkar Kecamatan Kejobong	Dinas Pekerjaan Umum	5.850
56	Jalan Nangkod - Panunggalan	Dinas Pekerjaan Umum	2.100
57	Jalan Krangean – Langkap	Dinas Pekerjaan Umum	9.028
58	Jalan Kertanegara - Karangpucung	Dinas Pekerjaan Umum	13.488
59	Jalan Pengalusan - Katelklawu	Dinas Pekerjaan Umum	12.152
60	Jalan Karangmalang - Tangkisan	Dinas Pekerjaan Umum	7.500
61	Jalan Jumbleng – Serang	Dinas Pekerjaan Umum	8.259
62	Jalan Dagan-Palumbungan	Dinas Pekerjaan Umum	3.900
63	Jalan Kaliori – Tangkisan	Dinas Pekerjaan Umum	14.800
64	Jalan Kaliori – Gugrak	Dinas Pekerjaan Umum	8.100
65	Jalan Pepedan – Kedungula	Dinas Pekerjaan Umum	8.088
66	Jalan Tunjungmuli - dk.Tipar	Dinas Pekerjaan Umum	6.900
67	Jalan Tlahab Lor - Bayeman	Dinas Pekerjaan Umum	4.550
68	Jalan Karangwuni - Tamansari	Dinas Pekerjaan Umum	3.108
69	Jalan Jingkang – Danasari	Dinas Pekerjaan Umum	9.254
70	Jalan Makam – Sumampir	Dinas Pekerjaan Umum	13.557
71	Jalan Maribaya – Picung	Dinas Pekerjaan Umum	3.380
72	Jalan Baleraksa (Ponpes)- Kramat	Dinas Pekerjaan Umum	8.520
73	Jalan Majingklak – Tajug	Dinas Pekerjaan Umum	8.354
74	Jalan Tegalpingen – Sidareja	Dinas Pekerjaan Umum	8.337
75	Jalan Munjul - Karangbanjar	Dinas Pekerjaan Umum	3.628
76	Jalan Kutasari – Beji	Dinas Pekerjaan Umum	6.272

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
77	Jalan Tobong – Kajen	Dinas Pekerjaan Umum	11.328
78	Jalan Candinata – Kajen	Dinas Pekerjaan Umum	11.638
79	Jalan Purwadadi – Kajen	Dinas Pekerjaan Umum	6.808
80	Jalan Kajongan- Karangbanjar	Dinas Pekerjaan Umum	5.400
81	Jalan Banjaran – Slinga	Dinas Pekerjaan Umum	4.104
82	Jalan Wirasana – Galuh	Dinas Pekerjaan Umum	6.252
83	Jalan Gembong – Sawangan	Dinas Pekerjaan Umum	6.544
84	Jalan Gembong – Kajongan	Dinas Pekerjaan Umum	4.179
85	Jalan Bojongsari – Karangturi	Dinas Pekerjaan Umum	3.006
86	Jalan Beji – Karangbanjar	Dinas Pekerjaan Umum	5.193
87	Jalan Banjaran – Sindang	Dinas Pekerjaan Umum	2.820
88	Jalan Patemon – Karangturi	Dinas Pekerjaan Umum	4.620
89	Jalan Pekiringan – Grantung	Dinas Pekerjaan Umum	2.100
90	Jalan Penolih – Nangkasawit	Dinas Pekerjaan Umum	17.577
91	Jalan Penolih – Sinduraja	Dinas Pekerjaan Umum	5.292
92	Jalan Sidareja – Tetel	Dinas Pekerjaan Umum	4.911
93	Jalan Kalikajar – Slinga	Dinas Pekerjaan Umum	4.929
94	Jalan Kalikajar – Penaruban	Dinas Pekerjaan Umum	5.802
95	Jalan Sidanegara – Selanegara	Dinas Pekerjaan Umum	10.620
96	Jalan Wirasaba – Teya	Dinas Pekerjaan Umum	3.592
97	Jalan Majasari – Bajong	Dinas Pekerjaan Umum	12.112
98	Jalan Pekutukan – Karangnangka	Dinas Pekerjaan Umum	5.811
99	Jalan Penaruban – Cipawon	Dinas Pekerjaan Umum	8.976
100	Jalan Kutawis – Karangnangka	Dinas Pekerjaan Umum	7.805
101	Jalan Kutawis – Karangpucung	Dinas Pekerjaan Umum	5.295
102	Jalan Bukateja – Cipawon	Dinas Pekerjaan Umum	9.696
103	Jalan Bajong – Tidu	Dinas Pekerjaan Umum	4.470
104	Jalan Bajong – Karangpinggir	Dinas Pekerjaan Umum	2.489
105	Jalan Ponpes-Lawegede	Dinas Pekerjaan Umum	4.137
106	Jalan Karangrandu – Pangempon	Dinas Pekerjaan Umum	15.183
107	Jalan Gumiwang – Sokaegara	Dinas Pekerjaan Umum	7.963
108	Jalan Langgar – Punthuksuruh	Dinas Pekerjaan Umum	9.440
109	Jalan Nangkasawit – Pandansari	Dinas Pekerjaan Umum	1.683
110	Jalan Bandingan – Penolih	Dinas Pekerjaan Umum	3.657
111	Jalan Lamuk – Pandansari	Dinas Pekerjaan Umum	34.370
112	Jalan Nangkod – Kedarpan	Dinas Pekerjaan Umum	3.900
113	Jalan Timbang – Brangsong	Dinas Pekerjaan Umum	3.900
114	Jalan Soekarno	Dinas Pekerjaan Umum	2.006
115	Jalan Moh. Hata	Dinas Pekerjaan Umum	2.068
116	Jalan Hasyim Ashari	Dinas Pekerjaan Umum	2.068

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Luas</b>
117	Jalan Ahmad Dahlan	Dinas Pekerjaan Umum	2.256
118	DESA BANTARBARANG	Dinas Pekerjaan Umum	1.729
119	Kel. Kedungmenjangan	Dinas Pekerjaan Umum	-
120	Kel. Kedungmenjangan	Dinas Pekerjaan Umum	-
	<b>Jumlah</b>		

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Tahun 2018*